
PROGRAM INDONESIA PINTAR DAN UPAYA MENARIK ANAK TIDAK SEKOLAH UNTUK BERSEKOLAH

Kajian efektivitas Program Indonesia Pintar dalam memenuhi hak atas layanan pendidikan bagi anak dari keluarga rentan dan Anak Tidak Sekolah

08 November 2021

Program Indonesia Pintar adalah bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk memastikan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi anak dari kelompok miskin



Tujuan PIP

(Persesjen Kemendikbud No.8/2020)

- **Meningkatkan akses pendidikan** anak usia 6-21 tahun dari keluarga miskin
- **Mencegah siswa putus sekolah** karena alasan ekonomi
- **Menarik siswa putus sekolah** atau tidak melanjutkan untuk bisa kembali ke sekolah dan satuan pendidikan nonformal



Besaran PIP

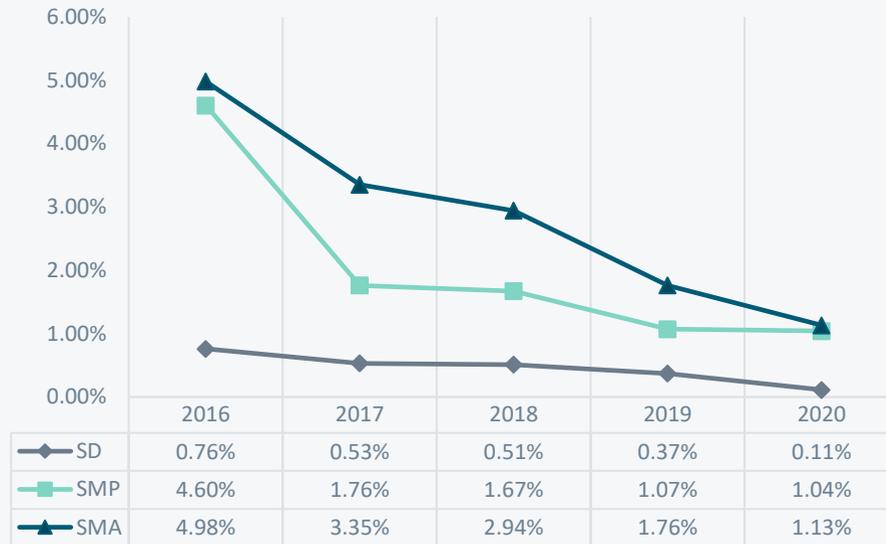
- SD/MI: Rp450.000/tahun
- SMP/MTs: Rp750.000/tahun
- SMA/MA: Rp1.000.000/tahun



Target PIP

- Tahun 2014, alokasi PIP sebesar **4,3 T** dengan cakupan **7,9 juta siswa**
- Tahun 2015, alokasi PIP sebesar **11,2 T** dengan cakupan **20,2 juta siswa**
- Pada 2016, **PIP juga diberikan pada ATS**

Meski telah berkembang dengan pesat, implementasi PIP yang efektif masih menghadapi beberapa tantangan terkait penargetan, manfaat, kelembagaan, dan terutama dalam menarik Anak Tidak Sekolah (ATS) kembali ke institusi pendidikan



Angka Putus sekolah 2016-2020



Jumlah **ATS** 2019:
4,3 juta anak

Penurunan angka putus sekolah cenderung stagnan sejak 2017

Melakukan review menyeluruh atas PIP dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan mengatasi Anak Tidak Sekolah

Wilayah studi dan metode pengumpulan data



Kuantitatif

Data sekunder



Susenas 2017-2019 & Podes 2018

Survei daring



Disebar ke dinas pendidikan/agama & sekolah (total 529 di 24 provinsi)

Kualitatif



Wawancara mendalam

Daring (pusat) & tatap muka (provinsi, kabupaten, desa, sekolah, rumah tangga)
Total: 141 WM



FGD

Daring (pusat, kabupaten) & tatap muka (desa, sekolah, anak)
Total: 25 FGD

Sudahkah PIP menjangkau anak tidak sekolah?

Tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara perubahan tingkat penerimaan PIP pada level kabupaten dengan perubahan proporsi ATS dan perubahan tingkat putus sekolah pada kabupaten tersebut

Analisis Determinan Perubahan Tingkat Tidak Bersekolah

	Perubahan tingkat tidak bersekolah			
	Kelompok 7-12 tahun	Kelompok 13-15 tahun	Kelompok 16-18 tahun	Kelompok 7-18 tahun
Proporsi penerima PIP per kelompok usia	-0,014	-0,001	-0,008	-0,011
	(0,043)	(0,053)	(0,064)	(0,055)
Tingkat partisipasi kerja lulusan SMA ke atas	-0,224*	-0,396**	-0,626**	-0,364**
	(0,131)	(0,166)	(0,273)	(0,156)
Proporsi ruta dengan KK berpendidikan SMA ke atas	-0,029	-0,115**	-0,242***	-0,087**
	(0,028)	(0,053)	(0,083)	(0,041)
Proporsi ruta dengan KK bekerja di sektor pertanian	0,035***	0,016	-0,045*	0,021
	(0,011)	(0,018)	(0,025)	(0,014)
Jumlah observasi	513	513	513	513
R2	0,385	0,245	0,177	0,284

Sumber: diolah dari Susenas (2017-2019)

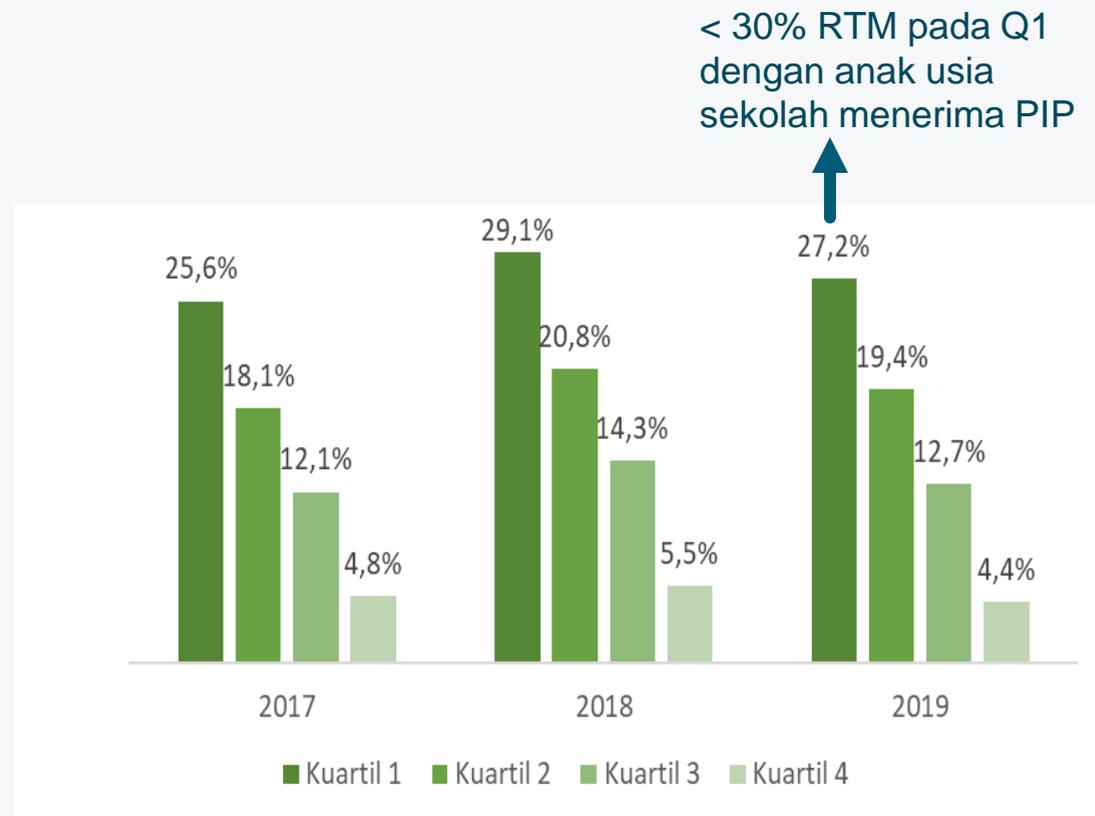
Tidak ditemukan juga hubungan yang signifikan secara statistik antara perubahan tingkat penerimaan PIP dengan perubahan tingkat putus sekolah pada level kabupaten

Analisis Determinan Perubahan Tingkat Putus Sekolah

	Perubahan tingkat putus sekolah		
	Tingkat SD/ sederajat	Tingkat SMP/ sederajat	Tingkat Sekolah Menengah (SM)/ sederajat
Proporsi penerima PIP per kelompok usia	0,015 (0,011)	0,000 (0,017)	0,005 (0,020)
Tingkat partisipasi kerja lulusan SMA ke atas	0,039 (0,036)	-0,023 (0,063)	0,027 (0,084)
Proporsi ruta dengan KK berpendidikan SMA ke atas	-0,001 (0,014)	-0,020 (0,024)	0,041 (0,032)
Proporsi ruta dengan KK bekerja di sektor pertanian	-0,006 (0,004)	-0,013 (0,008)	-0,013 (0,010)
Jumlah observasi	513	513	513
R2	0,295	0,133	0,066

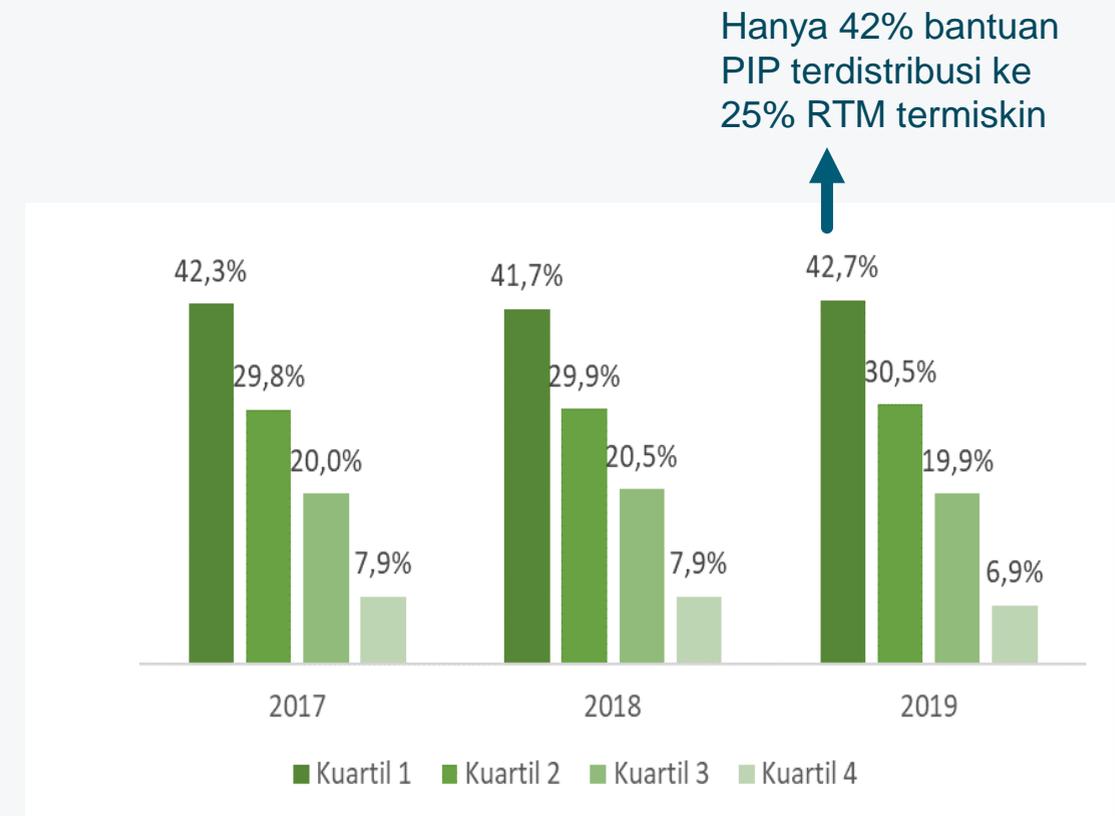
Sumber: diolah dari Susenas (2017-2019)

Ketidaktepatan sasaran PIP masih menjadi permasalahan yang ditemui di lapangan, yang juga berkontribusi pada rendahnya cakupan ATS penerima PIP



Proporsi Penerima PIP Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga dengan Anak Usia Sekolah

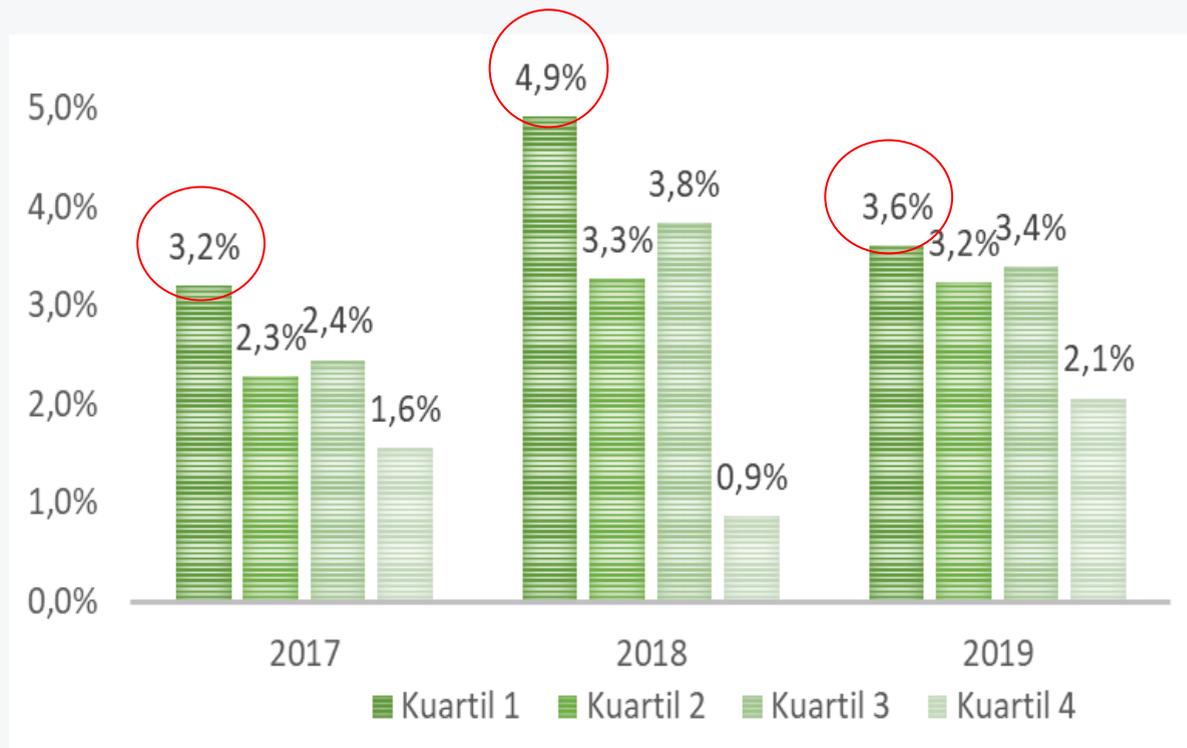
Sumber: diolah dari Susenas (2017-2019)



Distribusi Penerima PIP menurut Kuartil Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita

Sumber: diolah dari Susenas (2017-2019)

Hanya ada sekitar 3-4,9% rumah tangga dengan ATS dari kelompok termiskin yang menjadi penerima PIP pada periode 2017-2019



Hanya **3,6%** rumah tangga miskin pada Q1 dengan **ATS** yang menerima PIP pada 2019

Proporsi Penerima PIP pada Rumah Tangga dengan ATS

Sumber: diolah dari Susenas (2017-2019)

Mengapa PIP belum menjangkau ATS dan tidak berperan signifikan terhadap ATS?



Keberadaan **ATS** masih **sulit dideteksi** karena kurangnya ketersediaan data



Belum ada **intervensi/program khusus** pemerintah untuk menarik **ATS** bersekolah dan menerima PIP



Hasil survey daring: 85% sekolah tidak terdapat siswa penerima PIP yang pernah putus sekolah

Upaya memperbaiki ketepatan sasaran dan menjangkau ATS

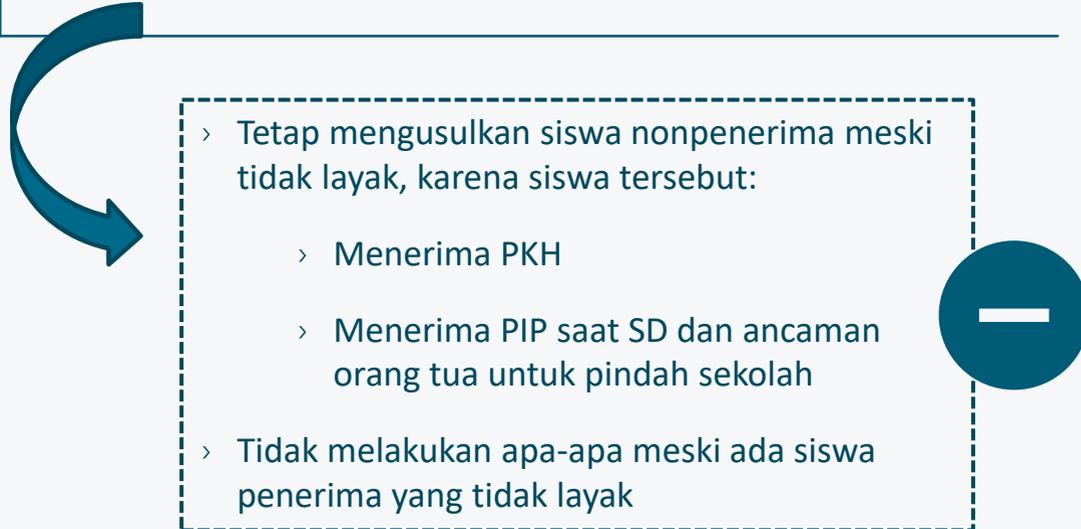
Pihak sekolah telah berupaya meminimalkan *inclusion* dan *exclusion error*

EXCLUSION ERROR

- › Memperbarui data Dapodik dengan memasukkan nama siswa nonpenerima yang orang tuanya terdampak pandemi Covid-19
- › Terus mengusulkan siswa nonpenerima yang layak

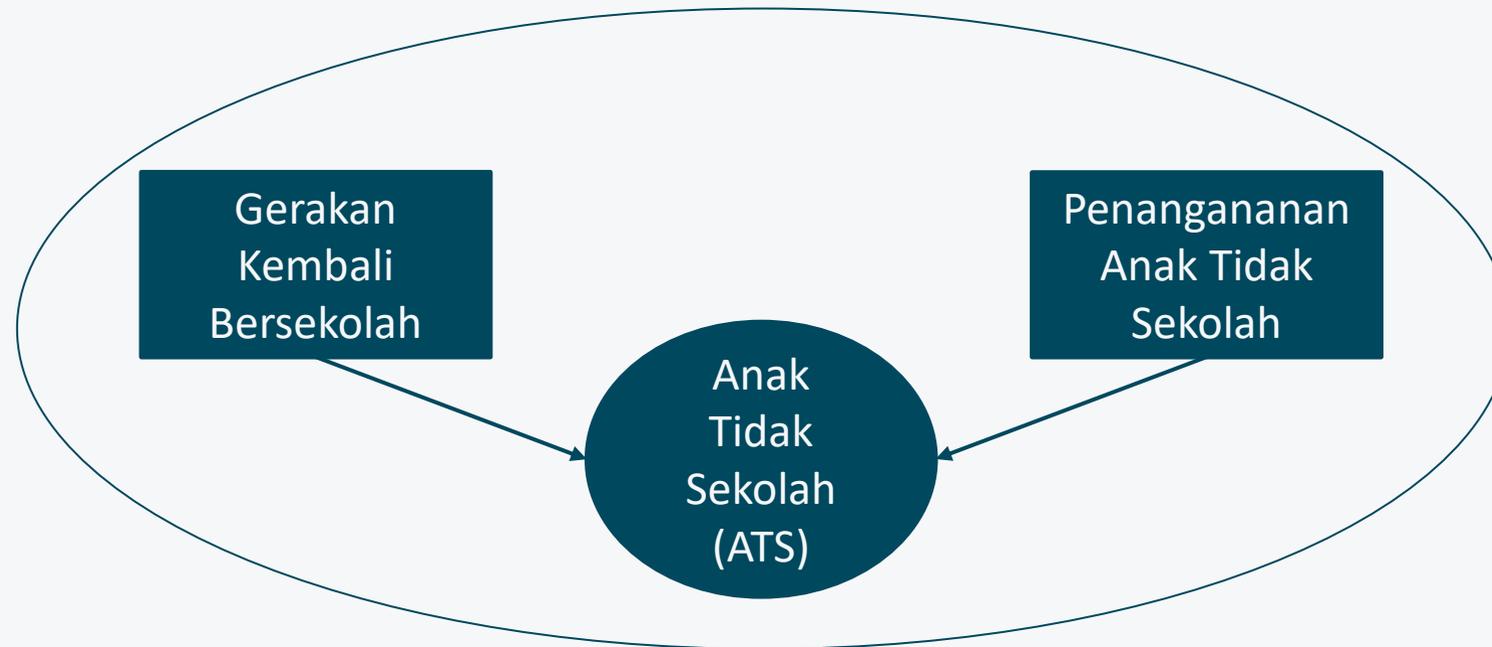
INCLUSION ERROR

- › Mengusulkan pembaruan data Dapodik dengan mengeluarkan nama siswa penerima yang tidak layak
- › Tidak mengusulkan siswa nonpenerima yang orang tuanya bekerja sebagai PNS/wiraswasta/guru

- 
- › Tetap mengusulkan siswa nonpenerima meski tidak layak, karena siswa tersebut:
 - › Menerima PKH
 - › Menerima PIP saat SD dan ancaman orang tua untuk pindah sekolah
 - › Tidak melakukan apa-apa meski ada siswa penerima yang tidak layak

Beberapa praktik baik ditemukan di lokasi studi sebagai upaya meningkatkan efektivitas PIP, terutama untuk menjangkau ATS

Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)



Inisiatif pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah untuk melakukan intervensi dan **penjangkauan** terhadap **ATS** ditemukan di Brebes dan Mamuju

Sekolah dan pendamping PKH berperan untuk mencegah anak putus sekolah atau mengembalikan ATS ke satuan pendidikan

Medan

Seorang siswa SMPN yang rentan putus sekolah diusahakan oleh sekolah untuk mendapatkan PIP. Bantuan berhasil didapatkan dan anak kembali bersekolah



Mamuju

Seorang siswa SMA swasta putus sekolah untuk bantu orang tua bekerja, dibujuk oleh pendamping PKH dengan 'diimingi' bantuan PIP. Anak bersedia melanjutkan sekolah dan memperoleh PIP.



Pemanfaatan dana PIP yang tepat dapat mencegah anak putus sekolah

Pengelolaan dana PIP: umumnya dikelola secara mandiri

Keperluan prioritas

Tunggakan iuran, seragam, buku, sepatu, kuota internet



Keperluan lain pendidikan

Tas, transpor, uang saku, les, biaya rapor/ujian/ulangan, iuran OSIS, biaya kelulusan/perpisahan/wisuda, study tour, ekskul, uang bangunan, ijazah, praktikum



Biaya sekolah saudara

“Kadang uang PIP juga dipakai sama saudara, sama teteh sama adik, teteh kelas 2 SMA, adik kelas 2 MI”
(wawancara dengan siswa penerima PIP, Lebak, September 2020)

Keperluan nonpendidikan

Konsumsi keluarga, kegiatan usaha orang tua, belanja baju, uang “terima kasih” kepada guru.

“Sama guru suruh beliin kuota, eh malah mereka shopping, shopping untuk belanja baju main”

(wawancara dengan siswa nonpenerima PIP, Brebes, September 2020)

Namun, pengelolaan dana PIP oleh satuan pendidikan juga ditemukan di seluruh wilayah

- ✓ **Mayoritas dilakukan oleh madrasah dan sekolah swasta**
- ✓ **Digunakan untuk biaya tidak langsung, baik biaya sekolah maupun biaya personal**



- Iuran OSIS
- Dipotong pihak sekolah Rp650.000 untuk membayar ujian dan biaya kelulusan/perpisahan, sisanya Rp100.000 diberikan kepada siswa penerima untuk keperluan sekolah lainnya
- Dipotong pihak sekolah Rp75.000 untuk siswa nonpenerima dan sisanya Rp300.000 diberikan kepada siswa penerima
- Diatur sepenuhnya oleh pihak sekolah (siswa/orang tua tidak pernah memegang uang PIP)

Langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas PIP dalam mengatasi ATS?

Rekomendasi terpenting adalah memperbaiki ketepatan sasaran PIP

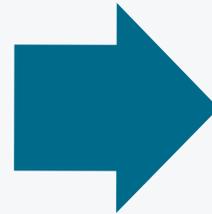
Jangka Pendek

Meningkatkan efektivitas PIP saat ini:

1. Memperbaiki ketepatan sasaran
2. Memperbaiki tata kelola
3. Melakukan penguatan/pendampingan

Kerangka waktu: 2022-2024

(3 tahun pertama)



Tahap Lanjutan

1. Memperluas cakupan
2. Menambah nominal bantuan

Kerangka waktu: setelah 2024

1. Memperbaiki ketepatan sasaran dengan memastikan siswa dan ATS dari kelompok marginal memperoleh haknya atas PIP



Meningkatkan ketepatan sasaran PIP terhadap anak dari keluarga miskin/rentan dan ATS

- Memutakhiran DTKS secara berkala
- Memperbaiki *inclusion* dan *exclusion error* penerima PIP
- Menyempurnakan pengintegrasian DTKS dengan Dapodik dan EMIS
- Menggunakan data-data lokal (seperti data ATS) yang tersedia di tingkat daerah/komunitas sebagai salah satu rujukan pemutakhiran DTKS



Membangun mekanisme untuk menjangkau ATS dengan meningkatkan peran sekolah, komunitas, dan pemerintah

- Memasukkan ATS secara eksplisit sebagai salah satu target PIP
- Membangun basis data ATS
- Menetapkan kuota minimum penerima PIP yang berasal dari kategori ATS



Membuat program bantuan pendidikan serupa PIP di tingkat daerah, yang dibiayai oleh pemerintah daerah



Kerangka waktu: 2022-2024 (3 tahun pertama)

2. Memperbaiki tata kelola PIP agar dapat mencegah anak putus sekolah dan menjangkau anak tidak sekolah



1. **Pengusulan ATS dan anak miskin/rentan sebagai penerima PIP**, dengan prosedur yang lebih jelas dan akuntabel. Pengusulan satu pintu (sekolah) dengan verval melalui musdes/muskel



2. **Penyaluran dana PIP** harus dilakukan tepat waktu dan terjadwal dengan baik



3. **Mekanisme pencairan dana PIP** menggunakan kartu identitas diri/KIP/buku rekening. Prosedur pencairan disesuaikan dengan kapasitas penerima (prosedur yang mudah dipahami)



4. **Pemanfaatan atau penggunaan dana PIP** sebaiknya diserahkan penuh pada orang tua dan siswa, dengan informasi secara terbuka terkait aturan pengelolaan dana PIP

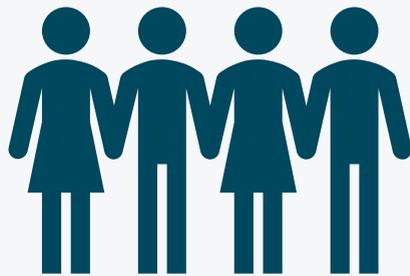


5. **Pengawasan dan pemantauan PIP**, dengan melibatkan Bappeda, aparat desa dan komite sekolah, serta meningkatkan fungsi pengawas sekolah/pihak eksternal



6. **Mekanisme pengaduan dan tindak lanjut** yang diperkenalkan secara lebih luas melalui infrastruktur yang sudah tersedia di desa/kelurahan

3. Melakukan penguatan/pendampingan untuk mempertahankan anak tetap bersekolah sekaligus menjangkau ATS



- Memetakan kembali dan memperkuat peran yang dapat dimainkan oleh berbagai pemangku kepentingan
- Memanfaatkan sumber daya yang sudah ada di tingkat desa untuk melakukan pendampingan dan penjangkauan pada ATS

Rekomendasi tahap lanjutan: meningkatkan cakupan, atau meningkatkan kebermanfaatan

1



Memperluas cakupan program (memastikan seluruh siswa dari keluarga miskin/rentan, khususnya ATS, menjadi penerima PIP)

Kerangka waktu: setelah 2024 (sesuai pertimbangan fiskal pemerintah)

2



Menambah nominal bantuan, dengan mempertimbangkan: komplementaritas PKH dan PIP, pengeluaran RTM untuk pendidikan, dan *opportunity cost* ATS yang bekerja

Kerangka waktu: setelah 2024 (sesuai pertimbangan fiskal pemerintah)

**Mari benahi pelaksanaan
Program Indonesia Pintar agar
semua anak Indonesia dapat
memperoleh haknya untuk
pendidikan!**

THANK YOU



@SMERUInstitute



The SMERU Research Institute



@SMERUInstitute



The SMERU Research Institute



@SMERUInstitute



Tel: +62 21 31936336

Fax: +62 21 31930850



Jl. Cikini Raya No. 10A, Jakarta
10330, Indonesia